



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI  
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan  
/BASARNAS)**

---

Tahun Sidang	: 2021 – 2022
Masa Sidang	: IV
Rapat	: Ke – 11
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Selasa, 29 Maret 2022
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 13.15 WIB s.d 16.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI dan secara Virtual Zoom Cloud Meeting dari tempat masing-masing.
Acara	: 1. Membahas mengenai pengelolaan Pelabuhan dan pelayaran di Indonesia; 2. Lain-lain.
Ketua Rapat	: Ir. Ridwan Bae
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: ..... Orang dari 55 orang Anggota Komisi V DPR RI secara Fisik dan Virtual
Hadir Mitra	: Dirjen Perhubungan Laut, Direksi PT Pelindo dan Direksi PT PelnI beserta jajaran.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat dibuka pada pukul 13.15 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Laut, Direksi PT Pelindo dan Direksi PT PelnI pada hari ini adalah membahas mengenai pengelolaan Pelabuhan dan pelayaran di Indonesia dan Lain-lain.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Dirjen Perhubungan Laut Direksi PT Pelindo dan Direksi PT PelnI untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT :


1. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Laut, PT. Pelindo dan PT. Pelnindo untuk melakukan kajian dan evaluasi terkait program Tol Laut serta melaporkan hasilnya kepada Komisi V DPR RI.
2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Laut untuk menginventarisir permasalahan pembangunan pelabuhan di Indonesia baik yang dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan maupun yang diselenggarakan oleh PT. Pelindo dan melaporkan hasilnya kepada Komisi V DPR RI.
3. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Laut dan PT. Pelindo untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan terkait pembangunan dan pemanfaatan Pelabuhan di seluruh Indonesia.
4. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Laut untuk melakukan upaya dalam peningkatan peluang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di pelabuhan seluruh Indonesia dan memberi ruang yang memadai bagi keikutsertaan masyarakat untuk berusaha di pelabuhan.
5. Komisi V DPR RI meminta PT. Pelindo dan PT. Pelnindo untuk meningkatkan koordinasi terkait pelayanan kepelabuhanan dan armada pelayaran dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB.

Jakarta, 29 Maret 2022

Plt. DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,



MUGEN S. SARTOTO

KETUA RAPAT,



RIDWAN BAE